

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Brebes telah menerapkan kelima prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik sesuai dengan Peraturan Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara serta ketentuan internal maupun eksternal. Adapun dasar hukum Internal berupa Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Kebijakan *Good Corporate Governance* dan dasar hukum Eksternal berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang penerapannya diwujudkan dengan :

1. Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi ini diterapkan dalam hal seorang *Customer Service* memberikan informasi terkait Produk BRI kepada Nasabah secara terbuka dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank serta ketersediaan Brosur/*Booklet/Starterpack* terkait informasi produk dan/ atau jasa bank di unit kerja.

2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan memberikan tugas dan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bawahan serta hasil pekerjaan didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik.

3. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip Pertanggungjawaban diterapkan dengan pengelolaan kerahasiaan *user-id* dan *password* untuk pengamanan dan menghindari penyalahgunaan *password* serta memenuhi Komitmen Bank terhadap Bank Indonesia dan/atau otoritas berwenang lainnya.

4. Prinsip Independensi

Prinsip Independensi dilaksanakan dengan menyampaikan laporan-laporan unit kerja secara akurat, tepat waktu dan menurut kondisi sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku serta selalu mengutamakan Kepentingan Perusahaan diatas Kepentingan Pribadi atau pihak lain.

5. Prinsip Kewajaran

Prinsip Kewajaran dilaksanakan dengan memberikan pelayanan kepada Nasabah secara adil sesuai ketentuan yang berlaku serta penyampaian informasi dan perlakuan pengembangan karir kepada pekerja dilakukan dengan memperhatikan hak & kewajiban secara adil & wajar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan sebaiknya perlu dibuat sanksi yang tegas oleh Pemerintah bagi

perusahaan yang dalam penerapan *Good Corporate Governance* dinilai kurang.

Hal ini dapat berdampak pada sebuah perusahaan agar menjadi lebih baik.